

BAB II

Keterpaduan Interpretasi Penilaian dalam BSNP 2006 dengan PAI – SD Negeri se Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal

A. Interpretasi Hasil Penilaian dalam BSNP 2006

1. Model Penilaian Kelas BSNP 2006

BSNP memberikan pengertian tentang penilaian kelas dengan rumusannya sebagaimana di bawah ini.

Penilaian kelas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi dasar setelah mengikuti proses pembelajaran (BSNP 2006 : 3).

Melihat rumusan yang praktis dan simpel tersebut, sebenarnya ada peluang perbedaan persepsi guru, KS dan bahkan pejabat pendidikan sendiri sehubungan dengan pemahaman otonomi daerah kemudian dapat berkembang Kabupaten/Kota satu dengan lainnya bisa berbeda dalam menentukan penilaian. Sebab dari proses yang berbeda sangat besar sekali kemungkinan hasilnya berbeda.

Selanjutnya BSNP 2006 memberi langkah-langkah penilaian seperti di bawah ini.

Penilaian kelas dilakukan melalui suatu proses dengan langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi

melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik. (BSNP 2006 : 3).

Dari rumusan tersebut jika dipadu dari rumusan pertama dan kedua ini maka BSNP 2006 menampilkan makna ambiga, artinya kalimat penentu BSNP 2006 bisa bermakna melebar bahkan sebenarnya satu dengan dua pada prinsipnya sama.

Menurut persepsi penulis, rumusan makna harfiahnya pada rumusan pertama dan kedua seharusnya mengandung pengertian obyektif seperti di bawah ini.

1. Guru ; - Melakukan kegiatan
 - Mengambil keputusan
 - Mencapai KD
 - Proses KBM
2. Guru ; - Merencanakan kegiatan
 - Membuat rumusan
 - Mengumpulkan bukti-bukti hasil

Ketika guru melakukan kegiatan tentu sudah terlebih dahulu telah merencanakan atau apa yang disebut RPP dan di dalamnya sudah termasuk SK-KD yang beberapa hendak diajarkan pada siswa lalu ada riwayat penilaian dari proses awal mendapatkan nilai sampai nilai akhir; bahkan metoda yang digunakan untuk mendapatkan nilai termasuk mengapa nilai anak jatuh, remedial, pengayaan dan apa yang seharusnya dilakukan agar

anak mencapai tuntas pada SK-KD tersebut. Sehingga mengumpulkan bukti-bukti hasil adalah riwayat penilaian.

Dengan demikian BSNP 2006 dalam Model Penilaian Kelas belum operasional memberikan rambu-rambu. Padahal yang disebut riwayat nilai adalah panjang. Apabila penulis mengutarakan sebagai upaya kritis terhadap BSNP ini, sebenarnya menempatkan proses belajar mengajar setelah perencanaan dan didalam perencanaan (RPP) guru sudah mengetahui tingkat atau bobot SK-KD dan indikatornya, sehingga nilai akhir akan disikapi sedini mungkin bahkan sampai pada materi tes (soal tertulis/lisan) dipertimbangkan.

Dari wacana ini timbul kemungkinan besar upaya guru atau sekolah hendak mengambil keputusan nilai melalui jalur binaan atau biasanya di sekolah ada Guru BP (Bimbingan dan Penyuluhan). Apalagi jalur ini ditempuh adalah sebuah alternatif akhir memberikan jalan terbaik bagi siswa melalui BP bahkan terkadang sampai orang tua / wali murid dipanggil untuk turut serta mengetahui riwayat nilai bagi anaknya. Hal ini terjadi jika siswa terindikasi tidak tuntas, setelah menempuh jalur remedial.

Patut dikembangkan semestinya dari rumusan dasar BSNP tersebut, sebab pada halaman lainpun BSNP menyebutkan pengertian ketuntasan minimal yang sekiranya hal ini pasti melewati proses nilai yang panjang tersebut. Sebagai pandangan analisis pada bab empat, penulis mengangkat ketentuan BSNP tentang ketuntasan minimal seperti dibawah ini.

Apabila nilai peserta didik untuk indikator pencapaian sama atau lebih besar dari kriteria ketuntasan minimal, dapat dikatakan bahwa peserta didik

telah menuntaskan indikator. Apabila indikator semua telah tuntas, dapat dikatakan peserta didik telah menguasai kompetensi dasar bersangkutan. Dengan demikian peserta didik dapat dipresentasikan telah menguasai standar kompetensi dan mata pelajaran (BSNP 2006 : 45).

Patokan seperti disebutkan BSNP 2006 halaman 45 sebenarnya mengandung pengertian pencapaian indikator tuntas atau belum tuntas, namun di lapangan terjadi pengisian pada buku raport, atau BSNP mengistilahkan buku Laporan Hasil Belajar Siswa (LHBS), apabila siswa mencapai KKM disebut tuntas, bagi yang belum mencapai disebut belum tuntas namun diisikan bagi yang tuntas disebut terlampaui, bagi yang belum tuntas disebut belum terlampaui.

Hal ini sebenarnya bukan masalah serius jika dimaknai sama, namun paling tidak penulis menangkap adanya ambiguitas tadi. Paparan model penilaian kelas BSNP 2006 khususnya yang berkaitan dengan penilaian kelas dan akhirnya menjurus pada KKM adalah wacana yang bagi kalangan guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dapat dijadikan pembandingan pijakan yang banyak diaplikasikan dengan teknik-teknik penilaian.

BSNP 2006, meskipun tidak memotret secara menyeluruh terhadap keberadaan Pendidikan Agama Islam SD, namun ada yang diambil sedikit tentang keberadaan PAI dan dikelompokkan derajatnya dengan Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

Sebagaimana penulis sebutkan dibawah ini.

Standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha) dikelompokkan menjadi 2 aspek yaitu.....(BSNP 2006 : 52).

Berdasarkan kerangka berfikir seperti tersebut maka bisa jadi perilaku yang tampak dalam kehidupan sosial bagi siswa Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha dipandang sama yang seharusnya ada pemilahan peran agama, terlebih pembatasan laki-laki dan perempuan dalam Islam tampak jelas sekali dengan ditandai muhrim dan bukan muhrim, adanya pembatasan aurot laki-laki dan perempuan dan amaliyah lainnya.

Penulis semakin yakin bahwa sekolah adalah lembaga yang multi kompleks terlebih jika disoroti dari kacamata ideologi, bahkan ada sebuah tulisan yang terdapat di majalah teropong menyebutkan sebagaimana dibawah ini.

Jadi sekolah bukan saja mengajarkan anak melek huruf, angka dan bahasa, tetapi juga sebagai sarana transfer atau transmisi berbagai ideologi yang dianut oleh negara, atau transmisi oleh berbagai ideologi (Teropong Media Pengawas PAI, 03 vol.1, 2008 : 52).

Seharusnya tataran BSNP 2006 tidak setengah-setengah atau bahkan tanggung-tanggung ketika menyentuh kepentingan pendidikan secara keseluruhan sehingga tidak berbenturan pada kawasan operasional persekolahan. PAI, telah berdiri kokoh Dirjen Bimbaga Islam, ketika berhadapan dengan otonomi daerah maka kalangan pemangku pendidikan

di daerah akan merujuk pada BSNP. Ternyata BSNP memberikan wacana tentang penilaian hasil belajar.

Penilaian hasil belajar baik formal maupun informal diadakan suasana yang menyenangkan, sehingga memungkinkan peserta didik menunjukkan apa yang dipahami dan mampu dikerjakannya. Hasil belajar seorang peserta didik dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan hasil yang dimiliki peserta didik tersebut sebelum mengikuti proses pembelajaran, dan dianalisa apakah ada peningkatan kemampuan, bila tidak terdapat peningkatan yang signifikan, maka guru memunculkan pertanyaan, apakah program yang saya buat terlalu sulit?, apakah cara mengajar saya kurang menarik?, apakah media yang digunakan tidak sesuai?, dan lain-lain. Tingkat kemampuan satu peserta didik tidak dianjurkan untuk dibandingkan dengan peserta didik lainnya, agar tidak merasa rendah diri, merasa dihakimi oleh pendidik tetapi dibantu untuk mencapai kompetensi atau indikator yang diharapkan. (BSNP 2006 : 3).

Disebutkan hasil belajar seperti tadi, maka paling tidak ada empat komponen yang disimpulkan yaitu menyenangkan, analisis plus minus, guru bertanya pada diri sendiri, tidak dianjurkan hasil per anak untuk dibandingkan.

Menurut hemat penulis interpretasi ini bersifat verbalistik, belum menjangkau obyek keberadaan nilai secara normatif. Dicontohkan menyenangkan, hal ini sangat elastis bagi guru dan siswa. Ketika dalam proses pembelajaran minat guru dan siswa besar, ada respon timbal balik maka tentu akan bisa menyenangkan. Atau sebaliknya tidak ada timbal balik tentu tidak mendapatkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya analisis plus minus, apalagi terjadi dalam proses mentransfer ilmu pengetahuan dengan pendekatan paedagogik bisa dianalisis? Untuk jawaban pertanyaan ini tentu terkait dengan penelitian kualitatif yang sifatnya adanya proses timbal balik bahkan sebab akibat, maka bisa terjadi

atau bisa tidak terjadi. Yang jelas BSNP 2006 terhadap interpretasi hasil penilaian belum sepenuhnya mengangkat kepentingan operasional pembelajaran yang berakhir pada penilaian.

Apabila menganalisis nilai, adalah hal kewajaran termasuk berpijak pada kalimat soal atau soal itu ke berapa yang rendah atau bahkan tidak bisa dan kemudian item soal tersebut diperbaiki atau kalimat pertanyaan disederhanakan. Dalam hal ini BSNP 2006 belum megembangkan ke sana, yang jelas di lapangan kejadiannya mengalami banyak interpretasi. Apalagi ketika BSNP 2006 menyebutkan tidak dianjurkan hasil prestasi siswa dibandingkan dengan siswa lain, dengan menduga akan menyudutkan bagi yang rendah. Jika hal ini dipasang pada PAI-SD, maka akan menjadi apa yang disebut nilai dakwah yang berfungsi sebagai motifator kepada siswa yang bernilai rendah tersebut.

Tapi pada wacana fungsi penilaian BSNP menyebutkan bahwa seorang siswa perlu remidi atau pengayaan. Jika akar ini yang dimaksud, tentu nilai rendah dapat diketahui lainnya. Disebutkan penilaian kelas memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menggambarkan sejauhmana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi.
2. Mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian sebagai bimbingan.
3. Menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan.
4. Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya.

5. Sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik (BSNP 2006 : 4)

Selama berorientasi pada KTSP, dan BSNP 2006 membahasakan tuntas berganti menjadi menguasai terhadap kompetensi. Ini artinya belum dipasok sebagai satu-satunya acuan dasar, lihat saja pada fungsi penilaian kelas item nomor satu disebutkan peserta didik telah menguasai suatu kompetensi, tidak menggunakan menuntaskan. Dengan demikian berkembang pula sesuai dengan kepentingan pendidikan sesuai yang disebutkan Dirjen bahwa, oleh sebab itu tidak ada standar kurikulum yang sentral universal melainkan menganut asas fleksibilitas dan terbuka dan senantiasa memperlihatkan sifat-sifat peserta didik dan kebutuhannya masing-masing (Dirjen Bimbaga Islam, 2001 : 15).

Selanjutnya BSNP 2006 memberikan rambu-rambu penilaian hasil belajar masing-masing kelompok mata pelajaran sebagai dibawah ini.

1. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:
 - 1). Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik.
 - 2). Ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
2. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.
3. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
4. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan dilakukan melalui:
 - 1). Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan
 - 2). Ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

Bertolak dari pemahaman ini, maka seharusnya BSNP 2006 memberikan pedoman pada unsur pengamatan penilaian PAI terkait bukan saja afektif dan kepribadian tapi termasuk psikomotor.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan sebuah tulisan Direktorat Madrasah dan PAI pada sekolah umum yang menyebutkan bahwa Penilaian aspek psikomotorik dilakukan selama berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada keterampilan motorik dalam menjalankan ajaran agama, seperti shalat dan baca tulis alquran (Direktorat Madrasah dan PAI pada Sekolah Umum, 2004 : 74).

Hal inilah yang menyebabkan penulis mengkritisi keberadaan sebuah institusi besar seperti BSNP 2006 yang kelahirannya ditopang oleh PP.RI No.19/2005 bab XI. Dan sementara Dirjen dari Kemenag mengatur lebih rinci tentang PAI. Kiranya tidak berlebihan apabila GPAI-SD tergoyahkan karena hal seperti ini. Dan untuk Kecamatan Tegal Timurpun gejala seperti ini terkadang naik ke permukaan yang akhirnya harus berhadapan dengan tangan panjang Kemenag di lapangan yaitu Pengawas Pendidikan Agama Islam.

Pada wacana BSNP tentang penilaian hasil belajar masing-masing kelompok mata pelajaran, untuk mata pelajaran agama termasuk pada Standar Isi – Standar Kompetensi Lulusan (SI – SKL) PAI-SD oleh Dirjen PAI-SD Depag RI tahun 2007, mengangkat Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SK – SD pada SD terdapat sebelas surat pendek ayat 3 Al Maidah dan ayat 13 Al Hujurot pengenalan tanda baca dan kalimat

huruf hijaiyah, menulis, membaca, menghafal dan mengartikan serta terampil melakukan shalat dengan baik dan benar (Dirjen Pendidikan Islam 2007 : 6)

Untuk ranah penilaian BSNP 2006 belum mampu menjamah keseluruhan kepentingan pembelajaran baca tulis Alqur'an dan terampil shalat yang termuat di dalam PAI – SD tersebut. Sebab mencontohkan melafalkan, melatih baca tulis itu ada unsur drill yang dilatih secara terus menerus agar tampak hasil yang dicapai sesuai indikatornya, bukan hanya melalui pengamatan saja.

Dengan demikian jika penulis mengkritisi panduan BSNP 2006 sebagai satu-satunya acuan atau pedoman penilaian PAI – SD, maka tidak bisa diterima.

2. Penilaian PAI – SD dalam BSNP 2006

Standar penilaian di kelas Dirjen Bimbaga Islam Depag RI 2003 : 48 mengundang tentang penilaian kemampuan keterampilan, satu diantaranya keterampilan shalat, dengan menggunakan skala penilaian. Jadi jelas terlihat pada pembuatan tes praktek harus memperlihatkan pedoman dan cara penilaian tersendiri. Dengan mempedomani seperti ini maka diharapkan dapat mengoptimalkan faktor obyektifitas penilaian sehingga ketepatan dan konsistensi persekoran tes praktek juga dapat meningkat.

Berikut ini disajikan contoh format skala penilaian yang dapat digunakan dalam penilaian keterampilan shalat.

Tabel : 1

Format Penilaian Penguasaan Rukun Shalat

Nama Siswa : Kelas :

No	Rukun Shalat	Kategori Penilaian	
		Betul	Salah
1	Lafal niat		
2	Sikap berdiri		
3	Takbir al ikhrom		
4	Membaca surat alfatihah		
5	Rukuk tumakninah		
6	I'tidal tumakninah		
7	Sujud 2x tumakninah		
8	Duduk diantara dua sujud dengan tumakninah		
9	Duduk akhir		
10	Membaca tasyahud akhir		
11	Membaca sholawat Nabi		
12	Memberi salam		
13	Menertibkan rukun		
Jumlah			
N.A			

$$\text{Rumus Penilaian} = \frac{BX10}{13}$$

NA = Nilai Akhir

(Dirjen Bimbaga Islam Depag RI, 2003 : 49)

Apabila dikembalikan pada visi pendidikan agama Islam di sekolah umum, maka wacana penilaian yang tersirat dalam BSNP 2006 tidak menyentuh. Sebab penilaian adalah satu unsur penting sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan pendidikan. Dapat disebut berhasil jika terjawablah apa yang menjadi visinya.

Disebutkan visi pendidikan agama Islam adalah “terbentuknya peserta didik yang memiliki kepribadian yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT serta tertanamnya nilai-nilai akhlak yang mulia dan budi pekerti yang kokoh yang tercermin dalam keseluruhan sikap dan perilaku sehari-hari, untuk selanjutnya memberi corak bagi pembentukan watak bangsa” (Dirjen Bimbaga Islam, 2001:2)

Sedangkan secara implisit BSNP 2006 tidak menyebutkan penilaian PAI – SD. Yang ada, hanya menyatakan bahwa standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha) dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu:

1. Kemampuan untuk mengembangkan konsep dan nilai-nilai kehidupan beragama, dan
2. Kemampuan untuk menerapkan konsep dan nilai kehidupan beragama melalui praktik atau pengalaman belajar (BSNP 2006 : 52).

Selanjutnya bagaimanakah layaknya untuk mengukur berhasil atau tidaknya pendidikan agama Islam di sekolah umum tersebut? Jawabannya adalah gunakan unsur-unsur evaluasi dengan baik dan benar.

Evaluasi dalam konteks pendidikan agama Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku manusia didik berdasarkan

pada standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek kehidupan mental psikologi dan spiritual religius.

Karena manusia didik hasil proses pendidikan Islam bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya bersifat religius melainkan juga berilmu dan berketerampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Allah dan masyarakat. (Depag RI, 2001 : 27). Untuk mencapai sosok pribadi yang religius, berilmu, terampil dan beramal, kiranya sejalan dengan pemikiran tentang perlunya perubahan kurikulum sekolah. Sebab di sekolah obyek garapannya adalah siswal, dan siswa merupakan bakal manusia akan datang.

Seperti disebutkan Nana dalam tulisannya bahwa berdasarkan pada apa yang menjadi fokus pengajaran, sekurang-kurangnya dikenal tiga pola desain kurikulum, yaitu :

1. Subject centered design, suatu desain kurikulum yang berpusat pada bahasa ajar.
2. Learner centered design, suatu desain kurikulum yang mengutamakan peranan siswa.
3. Problem centered design, desain kurikulum yang berpusat pada masalah yang dihadapi masyarakat (Nana Syaddih, 2006 : 133).

Apapun namanya baik perubahan, revisi, pengembangan disempurnakan terhadap kurikulum, yang jelas ada satu prinsip yang sama yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan manusia pada masanya.

Untuk ini Prof. Dandan menulis:

Sistem pendidikan nasional senantiasa perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional maupun global.

Kurikulum nasional perlu terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan lokal nasional dan global (Dandan, 2009 : 22).

Adapun secara khusus design kurikulum pendidikan agama Islam, seperti disebutkan sebagai berikut :

Kurikulum PAI harus menonjolkan agama dan akhlak yang diambil dari Al quran dan Hadis serta contoh-contoh dari tokoh terdahulu. Ciri ini harus sangat dominan terlebih ketika pengajaran budi pekerti disekolah terintegrasi dalam pendidikan agama Islam. Dalam komponen isi kurikulum sudah dapat di break-down, nilai-nilai etika, moral, akhlak, sosial dan kultural yang dapat diimplementasikan oleh siswa dalam kehidupan sosialdl konteks horizontal dan kehidupan spiritual dalam konteks Vertikal (Dirjen Bimbaga Islam, 2001 : 18)

Dari pengertian tersebut paling tidak ada beberapa hal penting terkait dengan penilaian menuju keberhasilan pendidikan agama Islam SD. Beberapa hal penting tersebut adalah standar penilaian, aspek komprehensif, aspek kehidupan mental psikologi dan spiritual religius adalah empat hal penting yang digarisbawahi.

Kemudian penulis mengangkat BSNP 2006, disitu disebutkan bahwa pendidikan agama Islam termasuk komponen ahklak mulia dan kewarganegaraan dan terkait penilaian afeksi dan kepribadian, hanya melalui pengamatan jika hal ini dijadikan acuan dasar, maka jauh bidikan visi yang tercantum sebagai motto pendidikan agama Islam SD. Sebab penilaian melalui pengamatan hanya sebagian dari cara-cara mendapatkan

nilai. Sedangkan pendidikan agama Islam memuat banyak unsur sehingga hanya ada satu titik keterpaduannya yaitu pada sisi pengamatan.

B. Model Penilaian PAI – SD

1. Ragam Penilaian PAI – SD

Penilaian merupakan salah satu proses penting dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kegiatan penilaian dapat dilakukan terhadap programnya sendiri, terhadap proses pelaksanaannya dan terhadap pencapaian hasil pelaksanaannya. Terhadap programnya merujuk pada ketercapaian tema sentral pendidikan agama Islam yang tiga komponen besar yaitu shalat, baca tulis qur'an dan akhlak mulia, sedangkan penilaian terhadap programnya adalah ketercapaian SK – SD dan indikatornya terakhir terhadap pencapaian hasil yaitu ketuntasan belajar baik nilai tes semester yang pada akhirnya menjadi nilai rata-rata normatif plus semester menjadi nilai akhir yang tercantum dalam buku laporan kemajuan belajar (buku raport) ataupun nilai akhir pada ujian yang ditempuh siswa.

Adapun beragam penilaian pendidikan agama Islam sebagaimana disebutkan dalam bukunya Dirjen Bimbaga Islam Depag RI sebagai di bawah ini

- Penilaian Keterampilan
- Penilaian Sikap
- Penilaian Portofolio (Dirjen Bimbaga Islam, 2005 : 51).

Yang dalam teknik penilaian bagi guru menggunakan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Dan semuanya mengikuti jejak peraturan daerah sampai pada proses kenaikan kelas maupun kelulusannya.

Di dalam sumber-sumber lain diimplikasikan sebagai acuan kriteria kenaikan kelas dan khususnya di kota Tegal memiliki acuan dasar sebagai disebutkan di bawah ini

KRITERIA KENAIKAN KELAS

1. Dirjen Mandiknas (2006 : 12) menyatakan bahwa kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran

Kriteria Kenaikan Kelas:

- a. Siswa dinyatakan naik kelas setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada dua semester dikelas yang diikuti.
 - b. Tidak terdapat nilai dibawah KKM (termasuk didalamnya PAI – SD)
 - c. Memiliki nilai minimal Baik untuk aspek kepribadian pada semester yang diikuti.
2. Dirjen Mendikdasmen (2006 : 33) menyebutkan bahwa siswa dinyatakan naik kelas ke tingkat di atasnya bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mencapai nilai rata-rata minimal untuk semua mata pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah.
 - b. Pada semester dua tidak mempunyai nilai prestasi kurang dari kriteria minimal ketuntasan belajar yang diterapkan sekolah.

- c. Rata-rata nilai kepribadian B (baik) atau A (baik sekali)
3. Dirjen Mendikdasmen (2007 : 40) menyatakan bahwa siswa dinyatakan naik kelas ke tingkat di atasnya bila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Jumlah mapel yang belum tuntas tidak boleh dari 25% dari jumlah mapel yang diajarkan di kelas masing-masing.
 - b. Memiliki nilai minimal baik pada aspek kepribadian.
 - c. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dua semester pada kelas yang diikuti.
 4. Depdiknas (2007 : 53 – 54) menyatakan bahwa mekanisme Penentuan naik dan tinggal kelas adalah;
 - a. Kenaikan kelas dilaksanakan satuan pendidikan pada setiap akhir tahun.
 - b. Siswa dinyatakan naik kelas apabila yang bersangkutan telah mencapai kriteria ketuntasan minimal.
 - c. Siswa dinyatakan harus mengulang di kelas yang sama 1) jika siswa tidak menuntaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar lebih dari empat mata pelajaran sampai pada batas akhir tahun pelajaran , dan 2) jika karena alasan yang kuat, misal karena gangguan kesehatan fisik, emosi, atau mental sehingga tidak mungkin berhasil dibantu mencapai kompetensi yang ditargetkan.
 - d. Ketika mengulang di kelas yang sama, nilai siswa untuk semua indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi yang

ketuntasan minimumnya sudah dicapai, minimal sama dengan yang dicapai pada tahun sebelumnya.

CONTOH KRITERIA KENAIKAN KELAS DI KOTA TEGAL

Peserta didik dinyatakan naik kelas ke tingkat di atasnya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Jumlah mata pelajaran yang belum tuntas tidak boleh lebih dari 25% dari jumlah mata pelajaran yang diajarkan di kelas masing-masing.
2. Memiliki nilai minimal Baik pada aspek kepribadian.
3. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dua semester pada kelas yang diikuti (Dinas Pendidikan Kota Tegal, 2010).

KRITERIA KELULUSAN

A. Kelulusan UASBN (SK BSNP No. 983 / BSNP / XI / 2007).

1. Kriteria kelulusan UASBN ditetapkan sekolah melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan:
 - a. Nilai minimum setiap mata pelajaran yang diujikan.
 - b. Nilai rata-rata ketiga mata pelajaran UASBN.
2. Kelulusan UASBN digunakan sebagai pertimbangan penentuan kelulusan sekolah.

B. Kelulusan UASBN (Permendiknas No. 39 Tahun 2007).

Kriteria kelulusan UASBN Tahun Pelajaran 2007 / 2008 ditetapkan oleh tiap sekolah / madrasah yang peserta didiknya mengikuti UASBN.

C. Kelulusan Ujian Sekolah (SKBSNP No. 1060 / BSNP / II / 2008).

1. Sekolah menetapkan nilai minimal untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.
2. Penentuan batas kelulusan perlu mendapat pertimbangan Komite Sekolah dan dilaporkan ke Diknas Pendidikan Kota melalui UPTD SD, serta diumumkan kepada siswa, orang tua, masyarakat, dan sekolah yang menggabung, 2 bulan sebelum ujian dilaksanakan.
3. Penentuan kelulusan bagi peserta ujian yang menggabung dilakukan oleh sekolah asal.
4. Peserta dinyatakan lulus apabila :
 - a. Memiliki nilai rata-rata minimal 6,00 baik untuk ujian tulis maupun praktek.
 - b. Mencapai nilai minimal batas lulus untuk setiap mata pelajaran yang ditentukan sekolah.
 - c. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - d. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk mapel kelompok Agama dan Akhlak Mulia, Kewarganegaraan dan Kepribadian, Estetika, Penjaskes.
 - e. Lulus Ujian Sekolah dan Lulus UASBN.

D. Kelulusan Ujian Sekolah (Permendiknas No. 5 Tahun 2008).

1. Kriteria kelulusan ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan melalui rapat dewan guru, memuat batas nilai minimal

setiap mata pelajaran dan rata-rata nilai seluruh mata pelajaran yang diujikan.

2. Peserta didik dinyatakan lulus dari sekolah setelah :
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk mapel kelompok Agama dan Akhlak Mulia, Kewarganegaraan dan Kepribadian, Estetika, Penjaskes.
 - c. Lulus Ujian Sekolah untuk mapel IPTEK.
 - d. Lulus UASBN.

CONTOH KRITERIA KELULUSAN DI KOTA TEGAL

Siswa dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan :

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
2. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk mapel kelompok Agama dan Akhlak Mulia, Kewarganegaraan dan Kepribadian, Estetika, Penjaskes. (Mapel Pendidikan Agama, PKPS, KTK, dan Penjaskes nilai minimal 7,10)
3. Mencapai rata-rata nilai minimal 6,00 untuk semua mata pelajaran yang diujikan, baik tertulis maupun praktek.
4. Nilai minimal untuk mata pelajaran Non UASBN (Bhs. Jawa, Bhs. Inggris, dan Komputer/TIK) lebih besar dari 6,00).
5. Mencapai nilai kepribadian B (Baik).
6. Lulus UASBN dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Nilai minimal untuk setiap mata pelajaran UASBN sebagai berikut :
 1. Bhs. Indonesia lebih besar dari 4,00.
 2. Matematika lebih besar dari 2,00.
 3. IPA lebih besar dari 3,00.
- b. Nilai rata-rata ketiga mata pelajaran UASBN lebih besar dari 3,00.

2. Program Layanan Tuntas PAI - SD

Standar isi tidak semata-mata meningkatkan pengetahuan peserta didik, tetapi kompetensi secara utuh yang merefleksikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai karakteristik masing-masing mata pelajaran. Dengan kata lain, kurikulum tersebut menuntut proses pembelajaran di sekolah yang berorientasi pada penguasaan kompetensi-kompetensi yang telah ditentukan. Jika siswa belum menguasai, disebutkan belum tuntas, sehingga siswa mengikuti program layanan tuntas.

Kurikulum ini memuat sejumlah standar kompetensi untuk setiap mata pelajaran. Satu standar kompetensi terdiri dari beberapa kompetensi dasar. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, satu kompetensi dasar dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian hasil belajar. Indikator tersebut menjadi acuan dalam merancang penilaian mencapai tuntas.

Sebenarnya ada prioritas penilaian pada ranah afektif khusus pendidikan agama Islam. Dan hal ini yang bisa menjadi standar tuntas pada target KKM, sebab nilai afektif banyak menggunakan skala sikap (walaupun guru kelas sering bergurau dengan istilah nilai “dengkulan”).

Didasarkan pada Buku Pedoman Pendidikan Agama Islam untuk skala umum, Dispendais pada sekolah umum (2004 : 74), menyebutkan bahwa dalam pembelajaran PAI penilaian yang dilakukan perlu memberikan cukup perhatian terhadap aspek afektif (sikap) meskipun juga tetap memperhatikan terhadap aspek pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotorik) secara seimbang.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penilaian berbasis kelas. Beberapa hal tersebut sebagai berikut :

1. Penilaian aspek kognitif dilakukan setelah peserta didik mempelajari satu kompetensi dasar yang harus dicapai pada setiap akhir semester dan jenjang satuan pendidikan untuk mengetahui daya serap siswa terhadap materi yang berkaitan dengan kognitif.
2. Penilaian aspek afektif dilakukan selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar (KBM) baik di dalam maupun di luar kelas, yang terorientasi pada perilaku peserta didik sehari-hari sebagai pengamalan nilai-nilai agama. Aspek afektif inilah yang menjadi perhatian utama dalam penilaian mata pelajaran PAI. Aspek afektif yang perlu dinilai meliputi : sopan santun kepada guru, karyawan dan teman sekolah, orang tua, keluarga, teman dan orang yang lebih tua di rumah ataupun

di masyarakat yang pada dasarnya untuk mengetahui sikap, perubahan siswa.

3. Penilaian aspek psikomotorik dilakukan selama berlangsungnya proses KBM yang berorientasi pada keterampilan motorik dalam menjalankan agama, seperti shalat dan baca tulis qur'an serta penampilan kinerja (Dirjen PAIS pd SU, 2004 : 70)

Melihat rambu-rambu penilaian di atas maka sebenarnya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, penilaian tidak hanya menitik beratkan pada aspek kognitif, tapi juga harus menekankan pada aspek afektif dan psikomotorik dan tujuan pendidikan lain terutama aspek non kognitif seperti pengembangan pribadi, kreatifitas, keterampilan interpersonal dan bakat minat.

Karena itu lengkaplah domain yang terangkat sebagai ranah keagamaan Islam khususnya. Dan dengan demikian tentu saja berbeda dengan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian sebagai yang disebutkan oleh BSNP 2006.

Sebagai pendukung kuatnya, adalah disebutkan dalam Buku Standar Isi Standar Kelulusan Pendidikan Agama Islam SD 2007 : 4 sebagai berikut :

“Pendidikan Agama Islam di SD bertujuan untuk :

1. menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi

- manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.
2. mewujudkan manusia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.

Akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian adalah hanya sebagian dari muatan pendidikan agama Islam. Dapat diketahui pada tujuan nomor dua menyebutkan, mewujudkan manusia Indonesia hal ini dapat dimaknai sebagai ukhuwah wathoniyah yang konotasinya adalah setia pada negaranya.

Berikut ini penulis paparkan tabel format penilaian PAI – SD sebagai sampel di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

ini tentu tidak bisa dijamah, sebab seorang guru/SD bahkan ada yang satu guru dua SD, mengamati seluruh siswa di sekolah saja tidak bisa apalagi di rumah. Maka yang terjadi adalah mengambil sikap standar KKM selagi tidak melakukan kelainan-kelainan yang bisa diamati dan bersifat negatif misalnya mencuri, berkelahi dan lainnya.

Dengan demikian ranah afektif sangat menunjang penilaian akhir pada pendidikan agama Islam SD. Sebelum mencapai standar KKM, murid yang belum tuntas mengikuti remedi dalam satu atau dua kali sampai tuntas.

Pada proses remedial, bagi siswa yang telah mendahului program pengayaan dan yang nilainya di atas tujuh puluh lima prosen, mengikuti program percepatan sampai melampaui SK – KD berikutnya. Walaupun demikian bagi mereka yang mengikuti program pengayaan dan percepatan tidak ada perubahan nilai secara normatif. Artinya standar awal murid memperoleh nilai di atas KKM itulah yang dijadikan nilai akhir.

Adapun pemanfaatannya program pengayaan dan percepatan niscaya pada SK – KD berikutnya bisa bermanfaat sebagai tutor sebaya.

Begitu tingginya keniscayaan Kementerian Agama khususnya dan para pemerhati penulis wacana pendidikan pada umumnya, untuk semuanya tumpuan akhir dipertanyakan berhasil atau gagalkah pendidikan agama Islam di sekolah?

Pertanyaan ini penulis melihat bahwa masih sekuat baja centang perenang diantara dua institusi besar (Diknas/BSNP dengan Kementerian

Agama) terhadap manajemen pengelolaan guru PAI yang diangkat oleh Diknas. Dan sebuah kenyataan kendala teknis tentang penerapan KKM PAI SD bisa terjadi dan dibaca sampai sekarang.

Sebuah tulisan Husni Rahim menyatakan bahwa Kekurang-berhasilan pendidikan agama di sekolah oleh sebagian pendapat dikatakan karena : isi pendidikan agama yang ada terlalu akademis, terlalu banyak topik, banyak pengulangan yang tidak perlu. Akhlak dalam arti perilaku hampir tidak diperhatikan kecuali yang bersifat kognitif dan hafalan. Di dalam hal pengajaran Al quran, proses yang ada hampir tidak memungkinkan anak didik memiliki kemampuan membaca dan menulis Al quran dengan baik karena metode yang dipakai tidak memadai (Husni Rahim. 2001 : 38).

Selain itu Bimbaga Islam, 2005 menyebutkan bahwa kualitas pendidikan dapat ditunjukkan oleh hasil pendidikan itu telah memenuhi apa yang disyaratkan di dalam kurikulum. Apabila sebagian besar siswa sudah mampu menunjukkan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap isi kurikulum, maka proses pendidikan itu berkualitas, demikian pula sebaliknya (Dirjen Bimbaga Islam, 2005 : 166).

Secara teoritis sebagai pijakan ilmiah bab ini telah mengetengahkan berbagai sudut pandang yang menurut hemat penulis cukup sebagai landasan teori sehingga mampu menopang bobot kajian berikutnya.